

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adnyani Ni Ketut Sari, 2019 “Hukum Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal” Jakarta
Raja Wali Pers
- Abdul Wahab, Solichin. 1991. Teori Implementasi. Jakarta : Raja Grafindo
- Abdurrahman, “Tebaran Pikiran mengenai Hukum Agraria” Bandung : Alumni.
- Ali, Achmad. 1996. Menguk Tabir Hukum. Jakarta:Candra Pratama
- Ali ,Zainuddin. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta :Sinar Grafika
- Bambang sutyoso, 2006.Penyelesaian Sengketa Bisnis, Yogyakarta: Citra Media.
- Bernhard Limbong, 2012.Konflik Pertanahan, Pustaka Margareta, Jakarta.
- Boedi Harsono, 1998. Hukum Agraria Indonesia: sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksananya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta.
- Elza Syarief, 2014. Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, PT Gramedia, Jakarta.
- Fahmal Muin, 2008. Peran Asas-Asas Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Gunawan Waradi, 2001, Masalah Pembaharuan Agraria: Dampak Land Reform Terhadap Perekonomian Negara
- Maria S.W. Sumardjono,2008. “Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya” Jakarta : Kompas.
- Rusmadi Murad, 1999. “Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah” Bandung : Alumni.
- Soehartono ,Irawan. 1999. Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang
- Sumarja Fransiskus Xaverius, 2015 “Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing” Masalah Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- Samun Ismaya, 2013, Hukum Administrasi, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.
- Sunggono, Bambang. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja grafindo Persada
- Sumarto, 2012.“Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI” Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September.

Windari Ratna Artha, 2017 “ Pengantar Hukum Indonesia” Raja Grafindo Persada Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Pasal 1 butir 1

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatgunaan Tanah

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementrian Agraria dan Tata Ruang

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2012, Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Konflik Pertanahan.

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 , Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bab II Bagian Umum Pasal 16 Ayat (1) UUPA

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

MAKALAH DAN KARYA ILMIAH

Elfachri Budiman, “Peradilan Agraria (Solusi Alternatif penuntasan Sengketa Agraria)” Jurnal Hukum USU Vol. 01.No.1, Tahun 2005

Eko aryono, “Catur Tertib Administrasi Pertanahan” Jurnal Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hassanudin Makasar, Tahun 2017

Hasim Purba, “Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat : Sengketa Petani VS Perkebunan” Jurnal Law Review, V. X No 2. UPH, 2010.Hal 167.Bandingkan dengan Widiyanto, “Potret Konflik Agraria di Indonesia” Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM – STPN, Nomor 37 Tahun 12, April 2013.

Mira Novana Ardani, “Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahana Nasional” Makalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2019.

Sholih Mua'di,“Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan melalui cara Nonlitigasi (Suatu Studi Litigasi dalam Situasi Transisional)” Semarang : Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008.

Syaiful Azam, “Eksistensi Hukum Tanah dalam mewujudkan tertib Hukum Agraria” Makalah Fakultas Hukum USU – Digitized by USU Digital Library, 2003.

INTERNET

<http://www.bpn.go.id/Program-prioritas/penangan-kasus-pertanahan.>, di Akses 2 Januari 2020, Pukul 18.22 WITA

<http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan.>, di Akses 2 Januari 2020, Pukul 20.19 WITA

<https://www.nusabali.com/berita/61409/sertifikat-lapangan-bungkulan-cacat-administrasi/halaman/1>, akses tanggal 29 Desember 2019 Pukul 20.24 WITA

<https://baliexpress.jawapos.com/read/2019/11/12/165611/dipanggil-bpn-buleleng-terkait-sengketa-tanah-mekel-bungkulan-absen>, di akses 3 Januari 2020 Pukul 9.36 WITA

